BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 27 TAHUN 2019

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah merupakan langkah strategis untuk mewujudkan Pemerintahan Daerah dengan berpedoman pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 dan Nomor 37 Tahun 2013, serta dalam rangka memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, dan berkelanjutan perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

OPD | KABAG HUKUM

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018 – 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat Pemerintah Daerah sebagai pelaksana fungsi eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. Reformasi Birokrasi adalah proses menata ulang birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkah-langkah bertahap, kongkrit, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa.
6. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025.
7. *Road Map* adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
8. *Road Map* Reformasi Birokrasi adalah bentuk operasional *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahap ke tahap selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran pertahun yang jelas yang dimulai dari tahun 2018-2022.
9. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait area perubahan reformasi birokrasi.
10. Prioritas pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik/maju adalah prioritas yang ditunjuk untuk memelihara atau bahkan meningkatkan hal-hal yang sudah baik/maju, agar tidak terjadi kemunduran.
11. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan adalah prioritas yang berkaitan dengan pelayanan publik pada sektor tertentu dan sangat menyentuh kehidupan masyarakat.
12. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD.
13. *Quick Wins* adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
14. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani adalah penentuan satu unit tertentu yang melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh sebagai contoh bagi unit kerja lainnya.
15. Rencana Aksi adalah langkah-langkah rinci yang diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang atau jangka pendek.
16. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
17. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.
18. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
19. Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kondisi yang telah ditetapkan.
20. Monitoring adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan program kegiatan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan atau akan timbul untuk diambil tindakan sedini mungkin.
21. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (*input*), keluaran *(output)*, dan hasil *(outcome)* terhadap rencana dan standar.

OPD	KABAG HUKUM

BAB II
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

Pasal 2

Untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi dilingkungan Pemerintah Daerah maka disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Tahun 2018-2022;

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi bertujuan untuk memberikan arahan pelaksanaan reformasi dilingkungan Pemerintah Daerah agar program dan kegiatan yang telah disepakati dapat berjalan efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan.

BAB III
QUICK WINS REFORMASI BIROKRASI

Pasal 4

Quick Wins Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:
a. Penerapan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja; dan
b. Peningkatan Penerapan Standar Pelayanan pada beberapa OPD;

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 5

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri atas:

RINGKASAN EKSEKUTIF
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah
B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Daerah
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
B. Sasaran
C. Kegiatan-kegiatan
D. Rencana Aksi
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring
B. Evaluasi
BAB V PENUTUP

(2) *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Diundangkan di Liwa
pada tanggal 22 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG BARAT,

AKMAL ABD. NASIR

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 27

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	Bag. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : 27 TAHUN 2019
TANGGAL : 22 April 2019

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 – 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi yaitu menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akubtabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, terlebih dahulu telah diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Lampung Barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan

OPD | KABAG HUKUM

Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK melalui BKPSDM Kabupaten Lampung Barat;

3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat Kabupaten juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat Kabupaten juga sudah menerapkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang akan terus dikembangkan

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan program semua bisa melanjutkan sekolah telah melaksanakan pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;
2. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan akreditasi seluruh puskesmas di Kabupaten Lampung Barat;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kesehatan telah melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga melaksanakan pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, KIA, dan Akte gratis;
5. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja juga melaksanakan pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;
6. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Inspektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

OPD | KABAG HUKUM

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berhasil memperoleh nilai dengan kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID);
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Selain itu juga telah dilakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme Aparatur Sipil Negara. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah pekon/desa terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat

OPD | KABAG HUKUM

menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;

3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
   a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau A;
   b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;
   c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
   d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.
2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat peningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:

OPD | KABAG HUKUM

1. Melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi terbuka;
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Semantara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;
2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara transparan sehingga mengurangi kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

OPD | KABAG HUKUM

a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

1) Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini antara lain:

a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;

b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;

c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;

d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;

e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;

f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

2) Pengawasan

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

a) Secara kuantitas aparat pengawas di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat masih perlu ditambah namun secara kualitas sudah cukup baik, untuk mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;

b) Penerapan SPIP sudah dilaksanakan dan perlu peningkatan secara maksimal;

c) Tunjangan yang diberikan kepada aparat pengawas perlu ditingkatkan guna memberikan daya tarik bagi pegawai untuk mengembangkan karir di jabatan ini;

OPD | KABAG HUKUM

d) Sudah terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan pengawasan.

3) Tatalaksana

Berbagai langkah-langkah pengembangan dalam area ini antara lain:

a) Mekanisme koordinasi yang kuat antara OPD dan unit kerja di masing-masing OPD, untuk mengurangi berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang akan berakibat pada inefisiensi;

b) Belum diterapkan sistem e-audit dalam pengawasan dan penggunaan teknologi informasi sudah sepenuhnya memberikan dukungan yang efektif pada bidang-bidang lainnya seperti percepatan pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan informasi publik dan otomasi proses pelaksanaan tugas dan fungsi;

c) Standarisasi berbagai fasilitas kerja dan kantor perlu dilakukan untuk mendorong efisiensi.

b. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai persoalan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

1) Mempertahankan opini WTP dari BPK;

2) Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;

3) Penyediaan sarana penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemda khusus ASN dan Peratin (Kepala Desa);

4) Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;

5) Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;

6) Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;

7) Nilai akuntabilitas kinerja kategori B.

OPD | KABAG HUKUM

c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1) Pendidikan

Peningkatan kapasitas tenaga pendidik yang profesional dan kompeten dengan melaksanakan distribusi yang merata. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan berkualitas yang merata diseluruh sekolah-sekolah di Kabupaten Lampung Barat. Menjamin ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan, mengembangkan dan menerapkan sistem pembelajaran yang kreatif dan inovatif dengan mengintegrasikan pendidikan karakter, agama dan keagamaan yang mengacu pada standar nasional pendidikan.

2) Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena masih ada keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

a) Perizinan Urusan Pertanian
b) Perizinan Urusan Perikanan
c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum
d) Perizinan Urusan Pariwisata
e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
f) Perizinan Urusan Pertanahan
g) Perizinan Urusan Kesehatan
h) Perizinan Urusan Perdagangan
i) Perizinan Urusan Perindustrian
j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
k) Perizinan Urusan Penanaman Modal

OPD | KABAG HUKUM

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang akan dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;

2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

3) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang akan dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

1) Program Pelayanan kepada masyarakat mengenai Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Gratis;

2) Program Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perizinan sebagaimana menjadi prioritas sektor);

3) Program pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Lampung Barat melalui Ambulan Hebat.

d. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM)

Pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum ada OPD yang di usulkan berkaitan dengan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani.

OPD-OPD yang ada dipandang belum siap untuk melaksanakannya, selain belum memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, hal ini di karenakan Lampung Barat belum melaksanakan PMPRB oleh

OPD | KABAG HUKUM

Inspektorat sebagai leading sektornya. Tetapi diharapkan nantinya juga OPD yang mendapatkan tugas untuk menjadi contoh harus siap untuk di validasi.

OPD yang dipandang sudah mampu untuk dijadikan contoh Zona Integritas diharapkan nantinya bisa menjadi unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi. Karena itu OPD harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik lagi untuk kedepannya.

e. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

1) Penyediaan sarana penunjang untuk peningkatan kualitas pendidikan

Prioritas lain dalam sektor pendidikan adalah penyediaan saran penunjang yang meliputi antara lain penyediaan laboratorium, perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sesuai dengan perencanaan.

2) Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatitf dan inovatif.

3) Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

a) Listrik

OPD | KABAG HUKUM

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitasnya.

b) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat di lokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air besih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Lampung Barat.

c) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Lampung Barat.

d) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak terdapat pegunungan, perbukitan, sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

e) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

f) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

OPD | KABAG HUKUM

g) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

OPD | KABAG HUKUM

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : TAHUN 2019
TANGGAL : 2019

BAB I
PENDAHULUAN

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki birokrasi dari waktu ke waktu, sehingga birokrasi pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktek KKN secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerjanya.

Sebagai langkah awal dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Kabupaten Lampung Barat, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam kurun waktu lima tahun mendatang, dari tahun 2018 – 2022. Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas dan akubtabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah kabupaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat disusun dengan mengutama prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah kabupaten Lampung Barat saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima

OPD | KABAG HUKUM

tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

OPD | KABAG HUKUM

BAB II
GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah kabupaten Lampung barat, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada KPK;
3. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan;
4. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melalui Ispektorat juga melaksanakan penanganan kasus pengaduan meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa)

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pemberian Seragam Gratis kepada siswa baru SD/MI, SMP/MTs dan beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di kedokteran Perguruan Tinggi Negeri;

OPD | KABAG HUKUM

2. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program Ambulan Hebat;
3. Pelayanan tertib administrasi kependudukan kepada masyarakat Lampung Barat melalui program KTP, KK, dan Akte gratis;
4. Pelayanan perizinan terpadu kepada masyarakat Lampung Barat;
5. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah meliputi kasus penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, indisipliner, asusila, kehilangan SK, permohonan gugatan cerai yang menyangkut Aparatur Sipil Negara dan Peratin (Kepala Desa).

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kabupaten Lampung Barat sudah berhasil memperoleh nilai kategori B;
2. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Lampung Barat juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan SIKD untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
3. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematik dan sinergi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi terfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme pegawai negeri. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat

OPD | KABAG HUKUM

mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Lampung Barat diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kabupaten Lampung Barat, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mencegah atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Peningkatan fasilitas umum dan sosial di berbagai lokasi terutama di daerah/wilayah Pekon/desa terpencil;
2. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
3. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;
4. Memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Dari pemangku kepentingan internal pemerintah daerah harapan yang diungkap antara lain:
   a. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai BB atau A;
   b. Penerapan sistem penilaian kinerja yang betul-betul memperhatikan kinerja sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan *reward* dan *punishment* bagi pegawai. Pegawai yang memiliki kinerja lebih baik dari pegawai lainnya harus diberikan penghargaan yang lebih, sehingga memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik;

OPD | KABAG HUKUM

c. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
d. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku.

2. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kabupaten Lampung Barat;
3. Penerapan sistem pelayanan yang lebih akuntabel, dilihat dari kejelasan biaya, proses, progress, kepastian hukum dan petugas yang melayani.

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih perlu perbaikan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, langkah-langkah dalam rangka pengembangan SDM antara lain:

1. Penyusunan standar kompetensi jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator dan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka pengisian jabatan;
3. Dalam pengisian jabatan tinggi pratama dilaksanakan seleksi terbuka;
4. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepegawaian telah dibangun Sistem Informasi Pegawai Online (SIP Online).

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai langkah yang harus dilakukan antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik;
2. Perbaikan waktu Pelayanan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat kepada masyarakat terus ditingkatkan agar tidak memakan waktu yang lama;
3. Dalam kaitan dengan pelayanan pendidikan, disamping kuantitas dan kualitas guru juga terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan.

Semantara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, langkah-langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan terus ditingkatkan, dan prosentase anggaran belanja publik harus lebih besar dari belanja aparatur;

OPD | KABAG HUKUM

2. Efisiensi terkait dengan kelembagaan pemerintah daerah yang akan terus dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
3. Penerimaan dan penempatan pegawai sudah dilakukan secara transparan schingga mengurangi kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
4. Disiplin pegawai sudah mulai tinggi;
5. Penerapan pakta integritas terkait dengan janji pelayanan sudah sepenuhnya dijalankan dengan baik.

OPD	KABAG HUKUM

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat difokuskan pada empat fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam area ini antara lain:

a) Umumnya pegawai sudah memiliki kompetensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi;

b) Pengangkatan jabatan struktural juga pada umumnya sudah dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan persyaratan jabatan;

c) Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga sudah menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;

d) Manajemen kinerja pegawai sudah sepenuhnya diterapkan;

e) Dibandingkan dengan pemerintah daerah lainnya, kesejahteraan pegawai sudah cukup baik akan tetapi masih perlu peningkatan;

f) Para pemimpin/pejabat umumnya sudah dapat memberikan contoh kepemimpinan teladan kepada bawahannya.

OPD | KABAG HUKUM

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses dalam memperoleh pelayanan. Beberapa jenis pelayanan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, serta koordinasi antar OPD (Survey yang melibatkan Tim Teknis) yang terkait dalam pemberian pelayanan, yaitu:

a) Perizinan Urusan Pertanian
b) Perizinan Urusan Perikanan
c) Perizinan Urusan Pekerjaan Umum
d) Perizinan Urusan Pariwisata
e) Perizinan Urusan Komunikasi & Informasi
f) Perizinan Urusan Pertanahan
g) Perizinan Urusan Kesehatan
h) Perizinan Urusan Perdagangan
i) Perizinan Urusan Perindustrian
j) Perizinan Urusan Bidang Koperasi dan UKM
k) Perizinan Urusan Penanaman Modal

Kedua, *Quick Wins*. Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih akan menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

a. Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanannya, sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
b. Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

Adapun jenis-jenis pelayanan yang akan menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

Untuk meningkatkan pelayanan secara cepat,tepat, dan berkualitas dilakukan dengan inovasi pelayanan diantaranya :

OPD | KABAG HUKUM

a. Pelayanan two in one (KK dan KTP), pelayanan three in one (KK, KTP, dan Akta Kelahiran), pelayanan four in one (KK, KTP, Akta Kelahiran, dan KIA), pelayanan five in one (KK, KTP, Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian/akta perceraian);
b. Pelayanan dinamis/jemput bola ke sekolah-sekolah (perekaman e-KTP dan KIA);
c. Pelayanan dinamis/jemput bola ke pekon/desa/kelurahan dan mencetak dokumen di tempat;
d. Pelayanan pada moment-moment tertentu (Kesrak PKK, KB Kesehatan lomba pekon/desa, bulan Bhakti Gotong Royong, dan Kampung KB);
e. Pelayanan akte kelahiran secara online, dapat dilakukan dengan hanya menggunakan android yang terhubung dengan internet (registrasi pada http://www.dukcapil.kemendagri.go.id/layanan online).

f. Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) melalui "Diskon Hebat/datang investasi langsung konstruksi dengan hemat, benar, dan cepat (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor).

g. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui program "Ambulan Hebat" (Kegiatan ini ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam).

c. Kesehatan

Pelaksanaan program kesehatan dilakukan untuk menjawab isu strategis pembangunan di Kabupaten Lampung Barat khususnya pada sektor kesehatan, antara lain:

(1) Kematian ibu & bayi

Perlu dilakukannya semua upaya pendukung yang dapat meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak sehingga akan berdampak pada terus berkurangnya kematian ibu dan bayi yang diakibatkan oleh kurang optimalnya upaya pelayanan kesehatan pada ibu dan anak.

OPD | KABAG HUKUM

(2) Kasus gizi buruk

Penanganan kasus gizi buruk tidak hanya menjadi tanggung jawab sektor kesehatan namun juga harus mendapat perhatian dari semua sektor terkait, karena persoalan gizi buruk merupakan persoalan kompleks yang berkaitan dengan banyak faktor antara lain status ekonomi, sosial budaya, ketahanan pangan dan angka kemiskinan di Kabupaten Lampung Barat.

(3) Angka kesakitan akibat penyakit menular

Penyakit menular harus terus dilakukan pencegahan dan pengendalian yang melibatkan peran serta masyarakat dan juga perlu diwaspadainya kemungkinan untuk terjadinya *re-emerging disease*.

(4) Meningkatnya angka kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM)

Meningkatnya taraf hidup sebagian masyarakat berdampak pada terjadinya perubahan pola hidup yang cenderung tidak seimbang, hal tersebut meningkatkan faktor resiko terjangkitinya seseorang dengan PTM. Pencegahan dengan melakukan deteksi dini serta dengan melakukan pola hidup sehat dan seimbang saat ini menjadi prioritas utama yang sedang digiatkan oleh segenap pengambil kebijakan di pemerintahan pusat yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

(5) Pembiayaan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Target Total Coverage pada tahun 2019, dimana seluruh penduduk Kabupaten Lampung Barat terdaftar sebagai peserta JKN, merupakan pekerjaan rumah yang harus dapat diselesaikan. Sehingga segenap masyarakat di Lampung Barat dapat mengakses pelayanan kesehatan baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun pihak swasta yang sudah bekerjasama dengan BPJS.

OPD | KABAG HUKUM

(6) Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan kesehatan.

Pemenuhan SDM kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan harus terus dilakukan dengan mengerahkan berbagai upaya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

(7) Ambulans Hebat

Kegiatan ditujukan sebagai salah satu solusi untuk transportasi pasien gawat darurat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dalam wilayah kerja puskesmas yang didukung oleh Unit Ambulans Hebat dengan 3 (tiga) orang tenaga kesehatan dan 2 (dua) orang supir yang bertugas selama 24 jam.

a. Prinsip Kerja

Prinsip kerja kegiatan Ambulans Hebat adalah :

- Pertolongan harus cepat dan tepat
- Memberikan informed conset
- Memberikan pelayanan sesuai dengan kompetensi
- Memindahkan pasien dari rumah ke FKTP
- Memindahkan pasien dari TKP ke FKTP
- Pelayanan kesehatan diberikan secara gratis sampai tiba di FKTP

b. Prosedur Kerja

Prosedur kerja pemanfaatan Ambulans Hebat adalah :

- Menerima informasi kegawatdaruratan
- Menuju lokasi pasien
- Menilai kondisi pasien dengan cepat dan teliti
- Pengkajian awal pasien
- Stabilisasi pasien menurut prioritas
- Konsultasi dokter
- Menentukan tindakan pelayanan kesehatan sampai dengan evakuasi rujukan kefasilitas kesehatan lanjutan.

OPD | KABAG HUKUM

perpustakaan, dan buku-buku pelajaran serta buku-buku praktik yang dapat mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pelajar.

OPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan menjadi OPD yang berada digaris depan untuk melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

b. Ruang kegiatan belajar (RKB)

Terkait dengan bidang pendidikan, juga diperlukan ruang kegiatan belajar bagi masyarakat. Dengan adanya fasilitas ini diharapkan masyarakat usia sekolah menjadi lebih kreatitf dan inovatif.

c. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan ada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Listrik

Pelayanan penyediaan listrik menjadi bagian yang penting untuk mendukung berfungsinya sektor-sektor lainnya. Penyediaan listrik menjadi aspek yang sangat diperhatikan oleh para investor asing yang hendak berinvestasi di Kabupaten Lampung Barat. Penyediaan listrik yang selama ini dilaksanakan oleh PLN, tampaknya belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas dan keajegannya.

2) Instalasi Air Bersih

Penyediaan air bersih bagi masyarakat baik melalui PAM atau sarana air bersih untuk masyarakat dilokasi tertentu, juga menjadi prioritas yang perlu disediakan oleh pemerintah daerah. Sebagaimana juga penyediaan listrik, penyediaan air besih sangat diperhatikan oleh investor yang akan berinvestasi di kabupaten Lampung Barat

3) Jalan Kabupaten

Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kabupaten Lampung Barat adalah penyediaan jalan kabupaten. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

4) Jembatan

Kondisi demografis Kabupaten Lampung Barat yang banyak terdapat perbukitan, pegunungan dan sungai besar dan kecil, mengharuskan pemerintah daerah untuk membangun atau memperbaiki jalan-jalan dan jembatan-jembatan yang sangat penting untuk mendorong kelancaran transportasi antar lokasi yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

5) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

6) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

7) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan keperccayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

Prioritas OPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh OPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap OPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

OPD | KABAG HUKUM

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten	ASN Lampung Barat yang sesuai dengan standar Kompetensi	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang	40 orang
Meningkatnya Manajemen Kepegawaian yang berkualitas dan akuntabel	Pengisisan jabatan yang sesuai dengan standar kompetensi Jabatan	2 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan	3 Jabatan

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengawasan Internal dan Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil pengawasan internal secara berkala	163 laporan	163 laporan	163 laporan	163 laporan	163 laporan
	Jumlah laporan hasi penanganan kasus pengaduan	32 laporan	32 laporan	32 laporan	32 laporan	32 laporan
	Laporan Hasil Evaluasi SAKIP OPD LHR Lapkin Pemda	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR	29 LHE dan 1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil TLHP APIP	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
	Jumlah Laporan Hasil TLHP BPK	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Meningkatnya Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Jumlah Peserta Diklat Sertifikasi JFA dan P2UPD	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang	6 Orang

OPD | KABAG HUKUM

	Level Kapabilitas APIP	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4 DC
	Level Maturitas SPIP		Level 3	Level 3	Level 3	Level 4
Terlaksananya Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	Jumlah Laporan Hasil Reviu LKPD	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKA	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu Penyerapan Anggaran	4 LHR	4 LHR	4 LHR	4 LHR	4 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RKPD	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR	1 LHR
	Jumlah Laporan Hasil Reviu RPJMD	1 LHR	0 LHR	0 LHR	0 LHR	0 LHR

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemda yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntable	Jumlah OPD yang menyusun Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD	4 OPD
	Jumlah dokumen Tatalaksana	2 dokumen	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
	Jumlah OPD yang menyusun SPM	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD	5 OPD
	Jumlah dokumen Monitoring dan evaluasi tupksi	1 Dokumen	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
	Jumlah OPD yang terbina mengenai pelayanan publik	6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD	6 OPD
	Jumlah Dokumen SOP	1 dok	1 dok.	1 dok.	1 dok.	1 dok.
	Jumlah kasus yang terselesaikan (SIPP dan SP4N)	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus	1 kasus
	Jumlah dokumen kebutuhan PNS	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
	Jumlah Dokumen Reformasi Birokrasi	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok
Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Jumlah Aplikasi Pelayanan publik	6 aplikasi	6 aplikasi	6 aplikasi	6 aplikasi	6 aplikasi

OPD | KABAG HUKUM

d. Peraturan Perundang-undangan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas produk hukum daerah dan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah aparatur yang mengikuti penyusunan produk hukum daerah	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang	60 orang
	Jumlah Perda yang dilakukan fasilitasi pembentukannya	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda	10 Perda
	Jumlah Perbup dan Kepbup yang dilakukan harmonisasi dalam pembentukannya	35 Perbup dan 350 Kepbup	35 Perbup dan 350 Kepbup	35 Perbup dan 350 Kepbup	35 Perbup dan 350 Kepbup	35 Perbup dan 350 Kepbup
	Jumlah peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan ke OPD	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan	25 Peraturan perundang-undangan
	Jumlah produk hukum daerah yang disosialisasikan kepada masyarakat	8 produk hukum	8 produk hukum	8 produk hukum	8 produk hukum	8 produk hukum
	Jumlah desa/pekon/kelurahan yang mengikuti kegiatan desa sadar hukum tingkat Kabupaten	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan	15 desa/kelurahan dari 15 kecamatan
	Jumlah permasalahan hukum dan aparatur yang dilakukan pendampingan bantuan	1 permasalahan dan 1 aparatur	1 permasalahan dan 1 aparatur	1 permasalahan dan 1 aparatur	1 permasalahan dan 1 aparatur	1 permasalahan dan 1 aparatur

OPD | KABAG HUKUM

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) (Predikat Opini) atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	100%	100%	100%	100%	100%

c. Kegiatan Penanganan Kasus Dilingkungan Pemerintah Daerah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah	Jumlah laporan hasil penanganan kasus pengaduan	32 kasus	32 kasus	32 kasus	32 kasus	32 kasus

d. Semua bisa melanjutkan sekolah

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2020	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Angka partisipasi kasar (APK) SD	11,84 %	11,87 %	11,89 %	11,91 %	11,93 %
	Angka partisipasi kasar (APK) SMP	99,33 %	99,53 %	99,73 %	99,93 %	99,95 %
	Angka partisipasi murni (APM) SD	100%	100%	100%	100%	100%

OPD | KABAG HUKUM

	Angka partisipasi murni (APM) SMP	91,82 %	91,87 %	91,89 %	91,94 %	91,99 %
	Angka rata-rata lama sekolah	7,30 tahun	7,35 tahun	7,37 tahun	7,42 tahun	7,44 tahun
	Angka harapan lama sekolah	12,27 tahun	12,29 tahun	12,31 tahun	12,33 tahun	12,35 tahun
	Angka melanjutkan sekolah	90,35 %	90,60 %	90,75 %	90,83 %	90,85 %
	Nilai rata-rata ujian nasional (UN) SD	209,96 poin	210,01 poin	210,11 poin	210,21 poin	210,31 poin
	Nilai rata-rata ujian nasional (UN) SMP	235,91 poin	236,01 poin	236,11 poin	236,21 poin	236,31 poin
	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	32,09 %	32,11 %	32,13 %	32,15 %	32,17 %

e. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,99 %	74,02 %	74,03 %	74,05 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,97 %	73,98 %	73,98 %	74,00 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat sertifikasi	60,10 %	60,12 %	60,18 %	60,26 %	60,58 %

f. Saluran Telekomunikasi dan internet

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya layanan informasi kepada masyarakat	Persentase desa yang terhubung dengan jangkauan telekomunikasi dan internet	97%	97%	97%	97%	97%

OPD | KABAG HUKUM

g. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

NO	Sasaran	Indikator	TARGET				
			2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah UPT Puskesmas terakreditasi	4 Puskesmas	2 Puskesmas	2 Puskesmas	9 Puskesmas	4 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan pengelolaan keuangan dan pelayanan secara mandiri	0 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar	8 Puskesmas	3 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas	0 Puskesmas
		Jumlah UPT Puskesmas dengan tenaga sesuai standar	3 Puskesmas	6 Puskesmas	9 Puskesmas	12 Puskesmas	15 Puskesmas
2	Meningkatnya upaya promotif dan preventif dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah puskesmas melaksanakan pelayanan kesehatan pada kondisi krisis kesehatan	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas	15 Puskesmas
		Jumlah pekon dengan IKS 0,5-0,8	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon	5 Pekon
		Jumlah KK di Pekon/Keluraha n terdata lengkap	60000 KK	19592 KK	0 KK	0 KK	0 KK
3	Meningkatnya kemandirian, akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di puskemas	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
		Persentase obat yang memenuhi syarat	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
4	Meningkatnya kesehatan masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI) /100.000 Kelahiran Hidup	149 Kelahiran hidup	139 Kelahiran hidup	130 Kelahiran hidup	121 Kelahiran hidup	110 Kelahiran hidup
		Angka Kematian Bayi (AKB)	4,7 Kelahiran hidup	4,5 Kelahiran hidup	4,3 Kelahiran hidup	4,1 Kelahiran hidup	3,9 Kelahiran hidup

OPD | KABAG HUKUM

		Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase penurunan prevalensi balita kurus (wasting)	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %	< 10 %
		Persentase penurunan prevalensi balita stunting	35 %	32 %	30 %	27 %	25 %
5	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentasepelayanankeschatans kriningpadausia produktif	50 %	55 %	57 %	60 %	62 %
		Persentase Penemuan Kasus Baru TBC	50 %	60 %	65 %	68 %	70 %
		Persentase cakupan imunisasi dasar lengkap (IDL)	93 %	95 %	95 %	95 %	96 %
6	Meningkatnya sinergitas dan kemitraan lintas sektor, LSM dan dunia usaha	Persentase Peserta JKN	75 %	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya lingkungan sehat	Jumlah pekon/keluraha n dipicu STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat)	30 Pekon	33 Pekon	0 Pekon	0 Pekon	0 Pekon
		Persentase rumah sehat	49 %	55 %	60 %	65 %	70 %
8	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan	Jumlah pegawai yang diterima (tenaga kesehatan)	30 orang	15 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah pegawai yang diterima (Tim Monitoring)	4 orang	0 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah pegawai yang diterima (Sopir)	20 orang	25 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah peserta yang mengikuti simulasi	0 orang	45 orang	0 orang	0 orang	0 orang

OPD | KABAG HUKUM

		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan PPGD	40 orang	20 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Sopir	20 oranf	25 orang	0 orang	0 orang	0 orang
		Jumlah perlengkapan ambulan hebat	10 paket	5 paket	0 paket	0 paket	0 paket
		Jumlah operasional ambulan hebat	10 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan	15 Kecamatan

h. Indeks Reformasi Birokrasi kategori C

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (Predikat)	-	C	C	C	C

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Nilai sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) (predikat)	B	B	BB	BB	BB

j. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Predikat C

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (predikat)	-	C	C	C	C

OPD | KABAG HUKUM

k. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Predikat Sangat Tinggi)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik	Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) (Predikat)	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi

l. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Tersedianya Aplikasi yang terintegrasi (perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan)	Persentase input data perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Peningkatan kompetensi guru

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya mutu dan jangkauan pelayanan pendidikan	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,99 %	74,02 %	74,03 %	74,05 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki kualifikasi S1	73,97 %	73,98 %	73,98 %	74,00 %	74,06 %
	Persentase tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi S1	25,90 %	30,90 %	31,90 %	32,90 %	33,90 %
	Persentase Guru yang memiliki sertifikat sertifikasi	60,10 %	60,12 %	60,18 %	60,26 %	60,58 %

OPD | KABAG HUKUM

b. Pelayanan Perizinan Terpadu

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73 (B)	75 (B)	76 (B)	78 (B)	80 (B)

c. Pelayanan Gratis Administrasi Kependudukan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
1. Meningkatnya kualitas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	Indeks Kepuasan Masyarakat	68,16 %	70%	75%	80%	85%
	Jumlah Keluhan /pengaduan masyarakat	0	0	0	0	0
2. Meningkatnya tertib administrasi kependudukan	Cakupan kepemilikan KIA	8,33%	30,55 %	52,77 %	75%	100%
	Cakupan kepemilikan KTP	87%	90%	95%	98%	100%
	Cakupan Kepemilikan KK	85%	87%	90%	95%	100%
	Cakupan kepemilikan Akte kelahiran	85%	95%	100%	100%	100%
	Cakupan kepemilikan akte perkawinan	50%	55%	60%	65%	70%
	Cakupan kepemilikan akte perceraian	10%	20%	22%	25%	27%
	Cakupan kepemilikan akte kematian	50%	55%	60%	65%	70%

OPD | KABAG HUKUM

d. Jumlah Investasi Pemilikan Modal Dalam Negeri/Pemilikan Modal Asing (PMDN/PMA)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Investor di Lampung Barat	Jumlah investor Pemilikan Modal Dalam Negeri dan Pemilikan Modal Asing (PMDN/PMA)	3 Investor	3 Investor	4 Investor	5 Investor	5 Investor
	Jumlah Nilai Investasi PMDN/PMA	Rp 3.325.5 64.458	Rp 3.491.8 42.681.	Rp 3.666.4 34.815.	Rp 3.849.7 56.556.	Rp 4.042.2 24.384.

4. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Membangun Unit Kerja sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	-	2 OPD	3 OPD	4 OPD	5 OPD

5. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil PMPRB	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan

6. Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Terlaksananyan Koordinasi TP4D	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Koordinasi TP4D Kabupaten Lampung Barat	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan	4 laporan

OPD | KABAG HUKUM

7. Prioritas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Sasaran maupun target-target diserahkan kapada masing-masing OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1) Melakukan analisis jabatan;
2) Melakukan analisis beban kerja;
3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing OPD, termasuk rencana rekruitmen setiap tahun.
5) Memperbaiki sistem rekruitmen pegawai;
6) Melaksanakan rekruitmen sesuai sistem rekruitmen baru dan kebutuhan rekruitmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
7) Melaksanakan sistem rekruitment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi perioritas nasional.

8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk

OPD | KABAG HUKUM

sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
16) Menerapkan berbagai kebijakan kepegawaian yang menjadi kewajiban pegawai;
17) Menyusun rencana pengembangan kepribadian role model;
18) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
19) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
20) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor sesuai dengan beban kerja;
2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun;
3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;
4) Melaksanakan penerapan SPIP
5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
6) Memperbaiki SOP pengawasan;
7) Menerapkan SOP Pengawasan;
8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

c. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

OPD | KABAG HUKUM

1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3) Menyusun SOP;
4) Melakukan penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi;
5) Memperbaiki rencana penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
6) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
7) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
8) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
9) Menerapkan standarisasi fasilitas kantor;
10) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
11) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
12) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;
2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

OPD | KABAG HUKUM

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah daerah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan sarana pengaduan meliputi:

1) Merencanakan pengembangan proses pengaduan;
2) Melaksanakan pengembangan sasaran pengaduan;
3) Mengelola pengaduan;
4) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

d. Semua bisa melanjutkan sekolah

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan Penyediaan pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah meliputi:

1) Mengangkat guru honorer menjadi guru kontrak;
2) Seragam gratis bagi siswa baru SD/MI, SMP/MTs;
3) Bantuan siswa berprestasi;
4) Meningkatkan mutu pendidikan;
5) Beasiswa bagi siswa Lampung Barat yang diterima di Kedokteran Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;
7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan semua bisa melanjutkan sekolah;

OPD | KABAG HUKUM

8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

e. Peningkatan kompetensi guru

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas guru meliputi:

1) Menyusun rencana peningkatan kompetensi guru pada setiap tingkatan pendidikan;
2) Melaksanakan seluruh rencana peningkatan kompetensi guru;
3) Melakukan monitoring pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
4) Melakukan evaluasi pelaksanaan peningkatan kompetensi guru;
5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Saluran Telekomunkasi dan internet

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyediaan saluran internet di sejumlah tempat, meliputi:

1) Mengidentifikasi tempat-tempat strategis yang akan diberikan akses telekonikasi dan internet;
2) Menyusun rencana penambahan akses telekomunikasi dan internet di lokasi strategis beserta pembiayaannya;
3) Melakukan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan;
4) Melaksanakan seluruh rencana;
5) Memonitor pelaksanaan rencana;
6) Melakukan evaluasi;
7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Sistem integrasi layanan Jamkesnas

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka sistem integrasi layanan Jamkesnas, meliputi:

OPD | KABAG HUKUM

1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan Jamkesnas;
2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas terintegrasi dan pembiayaannya;
3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan Jamkesnas;
4) Memonitor pelaksanaan rencana;
5) Melakukan evaluasi;
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Barat

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Lampung Barat, meliputi:

1) Melakukan survey untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan kesehatan;
2) Menyusun rencana pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
3) Melaksanakan pengembangan sistem pelayanan kesehatan di berbagai unit pelayanan kesehatan;
4) Memonitor pelaksanaan rencana;
5) Melakukan evaluasi;
6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

i. Nilai akuntabilitas kinerja kategori B

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi BB atau A, meliputi:

1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
3) Memperbaiki berbagai berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
4) Memadukan penetapan kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;

OPD | KABAG HUKUM

5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
8) Memonitor pelaksanaan rencana;
9) Melakukan evaluasi;
10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

j. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan SIKD, meliputi:

1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan sistem SIKD untuk perbaikan;
2) Menyusun rencana perbaikan;
3) Mengembangkan sistem SIKD yang terintegrasi dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
4) Melaksanakan SIKD sesuai dengan rencana monitoring dan evaluasi pengawasan;
5) Memonitor pelaksanaan rencana;
6) Melakukan evaluasi;
7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pelayanan Perizinan

Pelayanan perizinan mengacu pada urusan pemerintah daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja meliputi:

OPD | KABAG HUKUM

1. Urusan Pertanian

    1. Izin Usaha Obat Hewan
    2. Izin Usaha Peternakan
    3. Izin Rumah Potong Hewan
    4. Izin Rumah Potong Unggas

2. Urusan Perikanan
    1. Surat Izin Usaha Perikanan

3. Urusan Lingkungan Hidup
    1. Izin Lingkungan

4. Urusan Pekerjaan Umum
    1. Izin Mendirikan Bangunan
    2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
    3. Izin Pemasangan Reklame (SIPR)

5. Urusan Pariwisata

    1. Tanda Daftar Pariwisata (TDP)

6. Urusan Komunikasi dan Informasi

    1. Izin Menara Telekomunikasi

7. Urusan Pertanahan

    1. Izin Lokasi

8. Urusan Kesehatan
    1. Surat Izin Rumah Sakit
    2. Surat Izin Apotik
    3. Surat Izin Toko Obat
    4. Surat Izin Klinik
    5. Surat Izin Pendirian Optikal
    6. Surat Izin Laboratorium Klinik
    7. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
    8. Surat Izin Operasional Puskesmas
    9. Surat Izin Praktik Dokter
    10. Surat Izin Praktik Dokter Gigi
    11. Surat Izin Praktik Dokter Spesialis
    12. Surat Izin Apoteker
    13. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian

OPD | KABAG HUKUM

14. Surat Izin Praktik Perawat
15. Surat Izin Praktik Bidan
16. Surat Izin Praktik Perawat Gigi
17. Surat Izin Fisiotrafis
18. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi

9. Urusan Perdagangan
    1. Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
    2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
    3. Tanda Daftar Gudang (TDG)
    4. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)
    5. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
    6. Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB)

10. Urusan Perindustrian
    1. Izin Usaha Industri (IUI)
    2. Tanda Daftar Industri (TDI)
    3. Tanda Daftar Usaha (TDU)

11. Urusan Bidang Koperasi dan UKM
    1. Izin Usaha Simpan Pinjam

12. Urusan Tenaga Kerja
    1. Izin Operasional Penyedia Tenaga kerja Migran
    2. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
    3. Kartu Pencari Kerja (AK1)
    4. Rekomendasi ID Calon Tenaga Kerja Migran
    5. Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

13. Urusan Penanaman Modal
    1. Izin Prinsip Penanaman Modal
    2. Izin Perluasan Penanaman Modal
    3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
    4. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan
    5. Izin Usaha

OPD | KABAG HUKUM

4) Penerapan PTSP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi :

(1). Pendelegasian kewenangan Bupati di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja;
(2). Pembentukan Tim Teknis Perizinan;
(3). Menyusun SOP, SPP, dan maklumat Pelayanan;
(4). Melakukan Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
(5). Melaksanakan Sosialisasi (secara langsung, media cetak);
(6). Pendampingan layanan perizinan oss.go.id;
(7). Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat;
(8). Pelaksanaan pengelolaan layanan pengaduan (helpdesk);
(9). Pengawasan dan Evaluasi.

5) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM)

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

(a). Penyiapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
(b). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
(c). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang telah ditetapkan;
(d). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
(e). Monitoring
(f). Evaluasi
(g). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

OPD | KABAG HUKUM

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

	Program	Kegiatan
1.	**Peningkatan Manajemen SDM Aparatur**	1) Analisis Jabatan
		2) Analisis beban Kerja
		3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan
		4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan OPD (termasuk tenaga auditor dan guru)
		5) Penyempurnaan sistem rekruitmen pegawai
		6) Pelaksanaan rekruitmen dengan sistem baru
		7) Penerapan sistem rekruitmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu
		8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai
		9) Penyusunan training need (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)
		10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan (termasuk untuk tenaga guru dan auditor)
		11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai
		12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai
		13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai
		14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya
		15) Penerapan kebijakan kepegawaian yang baru berlaku
		16) Penyusunan Rencana pengembangan kepribadian *role model*
		17) Monitoring
		18) Evaluasi
		19) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		20) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
2.	**Penguatan Pengawasan**	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor (diintergasikan dengan kegiatan nomor 3 dalam Program SDM)
		2) Penyusunan rencana pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 8 dalam Program SDM)
		3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP

OPD | KABAG HUKUM

Program		Kegiatan
		4) Penerapan SPIP
		5) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
		6) Pengembangan auditor (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM)
		7) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh OPD
		8) Sosialisasi tertib administrasi keuangan
		9) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di OPD
		10) Sosialisasi LHKPN
		11) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat
		12) Monitoring
		13) Evaluasi
		14) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		15) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
3.	**Penataan Tatalaksana**	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan
		2) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan)
		3) Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih
		4) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi (termasuk penyempurnaan SIKD)
		5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan (termasuk SIKD)
		6) Penerapan keterbukaan informasi publik
		7) Identifikasi tempat-tempat strategis untuk pemberian pelayanan akses internet gratis
		8) Penyusunan rencana penambahan akses telekomunikasi dan internet
		9) Kerjasama dengan pihak berkepentingan untuk pembukaan akses internet
		10) Pembukaan akses internet baru
		11) Monitoring
		12) Evaluasi
		13) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		14) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kabupaten Lampung Barat

OPD | KABAG HUKUM

	Program	Kegiatan
4.	**Penguatan Akuntabilitas**	1) Review rencana strategis pemerintah daerah
		2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan penetapan kinerja untuk tahun berikutnya
		3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja
		4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja
		5) Pelaksanaan manajemen kinerja
		6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai
		7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja
		8) Monitoring
		9) Evaluasi
		10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
		11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
5.	**Peningkatan Kualitas Pelayanan**	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan (termasuk pelayanan pendidikan, perizinan, kesehatan, dan pelayanan administrasi kependudukan)
		2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan
		3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat
		4) Pengkajian penerapan PTSP
		5) Pengembangan PTSP
		6) Penerapan teknologi informasi
		7) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)
		8) Monitoring
		9) Evaluasi
		10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
6.	**Penerapan PTSP**	(1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)

OPD | KABAG HUKUM

	Program	Kegiatan
		(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat
		(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)
		(4). Sosialisasi
		(5). Monitoring
		(6). Evaluasi
		(7). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		(8). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
7.	**Rencana Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya**	(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;
		(2). Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih
		(3). Uji coba
		(4). Penyempurnaan hasil uji coba
		(5). Sosialisasi
		(6). Penerapan
		(7). Monitoring
		(8). Evaluasi
		(9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
		(10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
8.	**Zona Integritas**	(1). Penyiapan OPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		(2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
		(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di pada OPD yang ditetapkan
		(4). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya
		(5). Monitoring
		(6). Evaluasi
		(7). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
9.	**Manajemen Perubahan**	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
10.	**Penataan Peraturan Perundang-undangan**	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan dijalankan hingga tahun 2022
11.	**Penguatan dan Penataan Organisasi**	

OPD | KABAG HUKUM

4. Prioritas OPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Dalam rencana aksi ini dijabarkan program yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah, sesuai dengan program-program prioritas dan fokus perubahan, kegiatan, dan penanggungjawab kegiatan pada masing-asing OPD.

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun rencana aksi reformasi birokrasi sebagai berikut :

OPD | KABAG HUKUM

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2018-2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR TARGET	KEGIATAN	PENANGGUNG JAWAB	2018												2019	2020	2021	2022
							TW 1			TW 2			TW 3			TW4						
				PROGRAM			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
A	MANAJEMEN PERUBAHAN																					
	Meningkatnya kesadaran Beragama dalam kehidupan bermasyrakat	Meningkatnya Kualitas Kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama	Fasilitasi dan Pembinaan kegiatan keagamaan	Meningkatnya Kualitas khidupan beragama dan kerukunan antar Umat Beragama																		
				100%																		
					MTQ	Kabag Kesra													√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

					Fasilitasi Penyelenggaraan haji/Umroh/ wisata rohani	Kabag Kesra													√	√	√	√
					Rangkaian Ramadhan, Idul Fitri dan Adha	Kabag Kesra													√	√	√	√
					Penyebaran Syiar Agama	Kabag Kesra													√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Meningkatnya kesadaran siswa thd permasalan kesehata	Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya prilaku hidup bersih, sehat dan derajat kesehatan siswa,	Pelaksanaan UKS/LSS	Kabag Kesra													√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

		n																					
				30 Sekolah																			
	Meningkatnya kualitas pelayanan sosial	Meningkatnya Fungsi, kualitas kepedulian dan kesadaran masyarakat thd permasalahan sosial	Peningkatan Kesetiakawanan sosial	Meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap permasalahan sosial	Monitoring dan Evaluasi hasil Bantuan hibah bidang keagamaan	Kabag Kesra													√	√	√	√
				122 lembaga																			
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Bagian Organisasi	Pembuatan SK Tim													√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

	Komitmen pimpinan terhadap pelaksanaan RB dinilai masih belum terlalu kuat dan merata di seluruh unit kerja	meningkatnya validitas data pelaku ekonomi daerah	Jumlah buku data pelaku ekonomi Kab. Lampung Barat	Pendataan Pelaku Ekonomi Kabupaten Lampung Barat	1. membuat SK Bupati tentang Tim Koor Data Pelaku Ekonomi Kab. Lam-Bar, 2. Rapat Koordinasi, Monitoring Data Pelaku Ekonomi Kab. Lam-Bar, 3. Pembuatan Buku Data Pelaku Ekonomi	Bagian perekonomian dan SDA													
	Terlaksananya Proses Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dilayani	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Surat masukmelalui bagian umum disposisi Asisten, Sekda,Distribusi ke OPD terkait		Kasubbag Umum & Kepegawaian										√	√	√	√
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air & Listrik	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rekening listrik,Telepon, , air diterima dibayarkan		Kasubbag Umum & Kepegawaian										√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

	Tersedianya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Terlayaninya Administrasi perkantoran dengan baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyewaan Tenda,Kursi,dan sound setiap ada acara PEMDA		Kasubbag Umum & Kepegawaian													
	Tersedianya Biaya Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Aparatur Pemerintah	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	-		Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√
	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Keuangan	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Operasional administrasi Keuangan		Kasubbag Keuangan											√	√	√	√
	Tersedianya komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Perbaikan instalasi listrik Perkantoran sesuai Kebutuhan		Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tarup,Kursi,Sound disewa jika ada Kegiatan Pemda		Kasubbag Rumah Tangga												√	√	√	√
	Tersedianya Makanan dan Minuman	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biaya makan minum dipergunakan sesuai kebutuhan		Kasubbag Rumah Tangga												√	√	√	√
	Tersedianya Biaya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biaya makan minum dipergunakan sesuai kebutuhan		Kasubbag Umum & Kepegawaian												√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

	Tersedianya biaya rapat-rapat koordinasi dan pembinaan dalam daerah	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Biaya Rapat koordinasi di pergunakan seluruh bagian dilingkup Sekretariat sesuai kebutuhan		Kasubbag Umum & Kepegawaian											√	√	√	√
	Tersedianya Kamar Penginapan	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Sewa gedung/ Penginapan digunakan pada saat ada tamu		Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√
	Tersedianya biaya Jasa TV berbayar,internet dan sandi	Terlayaninya Administrasi Perkantoran Dengan Baik	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jasa indivision dan Kavision dibayar setiap Bulan		Kasubbag Umum & Kepegawaian											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

	Meningkatkan sarana dan prasarana aparatur	Tercapainya Kinerja Pelayanan Administrasi Keungan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Honor petugas kebersihan dibayarkan, alat kebersihan terpenuhi, pemeliharaan rumah jabatan dapat dilaksanakan		Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	v
	Terjaganya Perlengkapan Rumah Dinas Dengan Baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpeliharanya Rumah Jabatan/Dinas		Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√
	Terjaganya PeralatanRumah Dinas dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Rumah Tangga											√	√	√	√
	Terjaganya peralatan Gedung Kantor dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Umum & Kepegawaian											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

	Terpeliharanya Meubeler dengan baik	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Kasubbag Rumah Tangga												√	√	√	√
	Bertambahnya kemampuan Aparatur dalam melaksanakan	Meningkatnya Pengetahuan Sumberdaya Aparatur	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			Kasubbag Umum & Kepegawaian												√	√	√	√
	Meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√

OPD HUKUM

	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tersedianya Laporan Keuangan	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√
	Tersedianya Laporan Keuangan	Tercapainya Pengelola Keuangan Daerah	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan SKPD			Kasubbag Keuangan												√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

		Pangan																			
	Rendahnya minta masyarakat terhadap pendidikan di lihat dari rata-rata lama sekolah.	Meningkatnya Penyelenggaraan pendidikan Non formal	Persentase penduduk tidak sekolah mengikuti pendidikan Non Formal		1. Membuat Draf Kegiatan													√	√	√	√
					2.Membuat SK Kegiatan																
					3. Membuat SPT																
					4. Membuat Laporan																
					1. Membuat Draf Kegiatan																
					2.Membuat SK Kegiatan																
					3. Membuat SPT																
					4. Membuat Laporan																
					1. Membuat Draf Kegiatan																
					2.Membuat SK Kegiatan																
					3. Membuat SPT																
					4. Membuat Laporan																

OPD KABA HUKUM

				Menyusun Materi SL Pengembangan Pupuk Organik	-																		
				Menyiapkan Bahan Pendukung	-																		
				Pelaksanaan SL Pengembangan Pupuk Organik	-																		
				Membuat Laporan Akhir Kegiatan	-																		
	Belum Optimalnya produksi Hortikultura	Meningkatnya Luas Panen Hortikultura	Jumlah Luas Panen Sayuran	Membuat SK Koordinator SL Hortikultura	-															√	√	√	√
				Melakukan Survey Calon Pelaksana SL	-																		
				Membahas dan Menetapkan Poktan Pelaksana SL	-																		
				Membuat SK Pendamping SL Hortikultura	-																		
				Menyiapkan Materi SL	-																		
				Menyiapkan Bahan Pendukung SL Hortikultura	-																		
				Pelaksanaan SL Horti	-																		
				Membuat Laporan Akhir Kegiatan	-																		

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

	7	Pelaksanaan manajemen kinerja individu yang selaras dengan manajemen kinerja unit atau organisasi yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kompetensi dan pengembangan karir pegawai guna mendukung pelaksaaan pengelolaan SDM yang berbasis merit masih belum dimulai.																				√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

			Meningkatnya Manajemen Pengelolaan SDM	Persentase unit kerja Dinas yang menyusun Perencanaan ASN yang sesuai dengan PP 11 Tahun 2017	Perencanaan ANJAB dan ABK																			
				Persentase ASN yang ditempatkan sesuai dengan Rencana pengadaan Jabatan	Pembinaan dan pengembangan aparatur																√	√	√	√
				Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensi sesuai dengan rencana pengembangan																	√	√	√	√
				Persentase JPT yang ditempatkan melalui open recruitment																	√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

		Kemampuan unit kerja pengelola SDM Pemerintah Kab. Lampung Barat masih berorientasi pada pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan belum pada pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia yang berfokus pada pengelolaan kinerja, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir pegawai.	idem	Persentase ASN yang di Mutasi, Promosi sesuai pola karir	idem	SDA	SDA													√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

		Budaya kinerja di kalangan pegawai belum dikembangkan. Hal ini ditandai dengan belum berjalannya pemberian *reward* dan *punishment* yang didasarkan pada kinerja.	Terciptanya Budaya Kerja Aparatur yang profesional	Jumlah ASN yang mendapatkan Punishment	Pengembangan dan Pembinaan ASN																√	√	√	√
				Jumlah ASN yang mendapatkan Reward																				

B	**Penataan Peraturan Perundang-Undangan**																								
1	meningkatnya pengendalian fluktuasi harga bahan pokok		pemantauan harga dan distribusi sembako	Berkurangnya Beban Masyarakat Menjelang Hari Raya	14000 Paket	Bagian perekonomian dan SDA															x	x	x	X
				Meminimalisir Penyelewengan Pelaksanaan Program Rastra	15 Kecamatan	Bagian perekonomian dan SDA															√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

				Terpantauny a tingkat inflasi Kabupaten Lampung Baratr	12 Bulan	Bagian perekonomia n dan SDA											√	√	√	√
	Meningkatnya Persentase Produk Hukum yang Terbentuk dan Masyarakat yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1. Persentase Pembentukan Produk Hukum yang Terealisasi	Penataan Peraturan Perundang undangan														√	√	√	√
		2. Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan															√	√	√	√
	Meningkatnya kualitas pembentukan peraturan daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang dilakukan Fasilitasi Pembentukann ya			- Membuat SK Bupati Kegiatan													√	√	√	√



| | | |

					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
	Meningkatnya pengetahuan OPD terhadap Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasikan Kepada OPD			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan											√	√	√	√
					- Mendownlod Peraturan Perundang-Undangan														
					'- Mencetak hasil download Peraturan Perundang-Undangan														

OPD | KABAG HUKUM

					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum	Jumlah Masyarakat yang Mengikuti Sosialisasi Produk Hukum Daerah			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan			√	√	√	√						√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan untuk mengirim Data Peserta Sosialisasi														
					- Menyampaikan Permohonan untuk menjadi Narasumber ke OPD yang terkait'														

OPD | KABAG HUKUM

					- Mensosialisasikan Perda dan Perbup di Kecamatan														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
	Meningkatnya kualitas pembentukan peraturan bupati dan keputusan bupati	Jumlah Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati yang dilakukan Harmonisasi dalam Pembentukannya			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

	Meningkatnya pengetahuan siswa terhadap peraturan perundang-undangan	Jumlah siswa/siswi yang Mengikuti Penyuluhan Hukum			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√
					- Membuat surat ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilanjutkan ke Sekolahan															
					- Melaksanakan Penyuluhan Hukum di Sekolah															
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															

OPD | KABAG HUKUM

	Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat di desa/keluraha n	Jumlah Desa yang Masuk dalam Kategori desa sadar Hukum Tingkat Kabupaten			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan															
					- Memverifikasi dan Pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum															

OPD | KABAG HUKUM

					- Menentukan Pemenang Desa/Kelurahan Sadar Hukum														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap produk hukum	Jumlah Produk Hukum yang di Publikasikan dalam Website JDIH			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan											√	√	√	√
					- Menguplod Perda dan Perbup Tahun 2017 ke JDIH Lambar														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
																#			

OPD | KABAG HUKUM

	Terciptanya kapasitas hukum bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan terselesaikann ya permasalahan hukum di kabupaten lampung barat	Jumlah Permasalahan Hukum dan Aparatur yang dilakukan Pendampingan Bantuan Hukum			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan										√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

					- Membuat MoU Pemda dengan Advokasi														
					- Pendampingan Bantuan Hukum bagi Aparatur dan Pemerintah Daerah														
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan														
	Terlaksananya lomba kadarkum tingkat kabupaten	Jumlah Kecamatan yang Mengikuti Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan														

OPD | KABAG HUKUM

					- Memverifikasi Kecamatan yang Rendah Kriminalitas															
					- Menghubungi Dewan Juri Lomba Kadarkum															
					- Menghubungi Peserta Lomba															
					- Pelaksanaan Lomba Kadarkum															
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
	Meningkatnya kualitas produk hukum dan kesadaran hukum masyarakat	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Penyusunan Produk Hukum Daerah			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

					- Menghubungi Narasumber dan Peserta Bimtek															
					- Membuat Surat pada Narasumber dan Peserta Bimtek															
					- Pelaksanaan Bimtek															
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
	Meningkatnya kualitas produk hukum daerah	Jumlah Perda dan Perbup yang dievaluasi			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√
					- Mengevaluasi Perda dan Perbup															

OPD | KABAG HUKUM

					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap produk hukum	Jumlah Produk Hukum yang disosialisasikan kepada Masyarakat			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan													√	√	√	√
					- Membuat Surat ke Kecamatan untuk Mengirim Data Peserta Sosialisasi																
					- Melaksanakan Sosialisasi																
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan																

OPD | KABAG HUKUM

	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap HAM	Jumlah Data Pendukung Capaian RANHAM Kab/Kota oleh Pemerintah Daerah sesuai Prosedur			- Membuat SK Bupati tentang Kegiatan												√	√	√	√
					- Membuat surat ke OPD															
					- Memverifikasi data pendukung dari OPD															
					- Membuat Laporan Akhir Kegiatan															
	Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi kegiatan DPRD	Persentase Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Kinerja Sekretariat DPRD	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah produk hukum inisiatif DPRD												100 %	√	√	√	√
				4 Buah																

OPD | BAGIAN HUKUM

	Meningkatnya Harmonisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah produk hukum daerah yang harmonis/tidak rumpang tindih	Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.															√	√	√	√

C	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI																			
1	Meningkatnya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Cascading Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Bagian Organisasi										√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

2	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintah	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah	50%	Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Tupoksi Perangkat Daerah	Bagian Organisasi								√	√	√	√
					Sosialisasi, monitoring dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah	Bagian Organisasi											
					Evaluasi Kelembagaan	Bagian Organisasi											

C	PENATAAN TATALAKSANA																				
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Bagian Organisasi								√	√	√	√
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Presentasi OPD yang melakukan tata naskah dinas sesuai peraturan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi								√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah Daerah	Peningkatan Kerjasama Antar Lembaga Pemerintah daerah		12 Bulan	1. Pelaksanaan Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pembiayaan pada Masyarakat	Bagian perekonomian dan SDA		√	√	√	√

				5 Kali, 0 Dokumen	2. Pelaksanaan Koordinai dan Monitoring dan Pengembangan Pertambangan dan Energi sumber Daya Mineral	Bagian perekonomian dan SDA	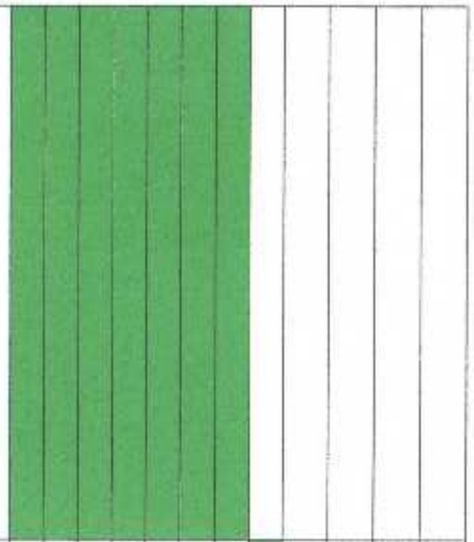
				100%	3. Fasilitasi Optimalisasi Pengelolaan Kawasan Hutan Di Kabupaten Lampung Barat	Bagian perekonomian dan SDA	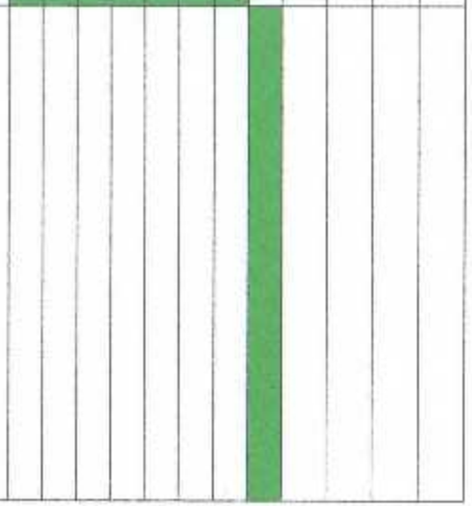

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

		tendernya																	
	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses tendernya	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Fasilitasi dan Koordinasi proses Pelaksanaan pengadaan Barang dan Jasa	Kasubbag Perencanaan Pengadaan									√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses tendernya	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Pelaporan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen									√	√	√	√
	Meningkatnya Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Jasa yang difasilitasi untuk proses tendernya	Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Konsultasi Hukum dan Sanggah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Kasubbag Evaluasi Pelaporan dan Pengelolaan Dokumen									√	√	√	√
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Presentasi OPD yang melakukan tata naskah dinas sesuai peraturan	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Penyusunan Tata Naskah Dinas	Bagian Organisasi									x	√	x	x

OPD | KABAG HUKUM

	Meningkatnya kualitas pelayanan	Persentase dokumen kinerja yang sesuai dengan Prosedur Kerja	Program Penerapan SOP Kelitbangan	Persentase Penerapan SOP	Pembuatan Prosedur Tetap Kegiatan Utama Kelitbangan	Sekretariat								√	√	√	√
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya sarana dan prasarana yang optimal	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	UPT KRL								√	√	√	√
					Pengadaan Peralatan Gedung Kantor												
					Pengadaan Komputer/Jaringan Komputer												

OPD KABAG HUKUM

	Meningkatnya e government	Persentase mekanisme kerja yang menerapkan e government	Program *e- Jurnal*	Tersedianya e jurnal untuk memuat hasil penelitian	Jurnal Kelitbangan	Kasubbid Kerjasama dan Publikasi								√	√	√	√
	Meningkatnya mekanisme dan prosedur pelayanan di Disbunnak	Jumlah Dokumen SOP yang baku	Penerapan SOP			Disbunnak								√	√	√	√

KABAG HUKUM

		Persentase pelayanan yang sesuai SOP				Disbunnak														

OPD KABAG HUKUM

						Disbunnak												
	Meningkatnya koordinasi dan pelayanan bidang ketahanan pangan kepada masyarakat	Penyediaan layanan informasi bidang ketahanan pangan	Program Peningkatan Perencanaan, Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan		Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data									√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

					Penyiapan materi siaran, pelaksanaan siaran		
			Program Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan		Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data		

OPD KABAG HUKUM

					Pengmpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data, koordinasi, tindakan intervensi			
			Program Pengembangan Sistem Distribusi, Stabilitas Harga dan Kelembagaan Pangan		Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data			
					Pengumpulan data, analisa data, penyajian data, pemanfaatan data			

OPD | KABAG HUKUM

			Program Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Keamanan Pangan		Jumlah dokumen analisa konsumsi pangan : 1 dok																
	Meningkatnya Penyelenggaraan pendidikan Non formal	Persentase penduduk tidak sekolah mengikuti pendidikan Non Formal	Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal		1. SK Pemaketan										√	√	√	√			
					2. Proses pengadaan																
					3. Kontrak keraja																
					4. Berita Acara serah terima																
					1. SK Pemaketan																
					2. Proses pengadaan																
					3. Kontrak keraja																

OPD | KABAG HUKUM

					4. Berita Acara serah terima	
					1. Sk Penerima Alat Bermain	
					2. Proses pengadaan	
					3. Kontrak keraja	
					4. Berita Acara serah terima	
	Persentase peningkatan prasarana dan sarana pertanian	Program Penyediaan dan Pengemb. Prasarana dan Sarana Pertanian	Tersedianya Infrasruktur Pertanian		Melakukan Survey Lokasi Kegiatan	√ √ √ √
					Melakukan Survey Harga Barang	
			20%		Membuat SK Pejabat Pengadaan	
					Menetapkan Lokasi Kegiatan	
					Melakukan Penyusunan SIDE	
					Membuat SK Paket Pekerjaan	
					Melaksanakan Pengaadaan Kegiatan Fisik	
					Melaksanakan Pekerjaan Fisik	
					Melaksanakan Pengawasan Pekerjaan	

OPD | KABAG HUKUM

					Membuat Laporan Akhir Kegiatan																		

E	PENATAAN MANAJEMEN SDM APARATUR																						
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Perhitungan Kebutuhan PNS	Bagian Organisasi												√	√	√	√		
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	20%	Perhitungan Kebutuhan PNS	Bagian Organisasi												√	√	√	√		
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Penyusunan HPS dan Kontrak	Kasubbag Perencanaan Pengadaan												√	√	√	√		

OPD | KABAG HUKUM

	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Kasubbag Perencanaan Pengadaan										√	√	√	√
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan										√	√	√	√
	Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah Pelaku Pengadaan yang memahami Aturan Pengadaan dalam pelaksanaan tender	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		Bimbingan Teknis Administrasi dan Hukum Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag Pengembangan dan Pengadaan										√	√	√	√
	Persepsi dan penerapan reformasi birokrasi belum sepenuhnya dipahami dan dilaksanakan oleh aparatur	Meningkatnya pola pikir dan budaya kinerja aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon	Persentase aparatur yang kinerjanya baik	Pendidikan dan Pelatihan formal	Jumlah aparatur yang meakukan pelatihan/ diklat ; 2 orang	Mengirimkan peserta diklat, perubahan prilaku kerja										√	√	√	√

OPD KA... HUK...

	Sebagian besar pegawai belum memiliki kompetensi bidang tugasnya	Tersusunnya indikator kinerja individu	Persentase pemenuhan dokumen kinerja : 100%	Penyusunan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis	Mempersiapkan data pendukung Penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Dokumen Perencanaan SKPD											√	√	√	√
						Membahas dan Memeriksa Draf Laporan																	
						Memperbaiki Hasil Koreksi Draf Laporan																	
		Tersusunnya Sistem Informasi Kepegawaian (SIP) online	Persentase pegawai yang telah mengisi SIP online : 100%			pengumpulan berkas dan entry data Masing-masing ASN ke aplikasi SIP Online																	
	Meningkatnya kualitas Penyuluh Pertanian dan	Persentase Penyuluh Pertanian dan Lembaga	Program Peningkatan Penyuluhan Pertanian dan	Pelatihan Penyuluhan Pertanian	58,451,500	Membuat SK Panitia, Narasumber dan Peserta											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

	Lembaga Tani	Petani yang berkualitas	Kelembagaan Tani			
						Mempersiapkan Bahan Pendukung
						Melakukan Koordinasi
						Mempersiapkan Materi Pertemuan
						Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan
						Membuat Laporan akhir
				Terbinanya Kelompok Tani	195,366,500	Membuat SK Panitia Pelaksana Kegiatan
						Membuat SK Pserta
						Mempersiapkan Bahan Pendukung
						Pelaksanaan Kegiatan Bedah dan Benah poktan
						Rapat Pembahasan dan Penetapan
						Membuat Laporan Akhir Kegiatan

OPD | KABAG HUKUM

				Jumlah dokumen : 1 dok																
	Terpenuhinya seluruh dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan	Persentase pemenuhan dokumen : 100%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen : 17 jenis													√	√	√	√
				Jumlah dokumen : 12 dok																
				Jumlah dokumen : 2 dok																
				Jumlah dokumen : 1 dok																
				Jumlah dokumen : 1 dok																
				Jumlah dokumen : 1 dok																

OPD KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

| | | |

| | | |

G	PENGUATAN PENGAWASAN																
1	Meningkatnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal	Jumlah OPD yang melaksanakan PMPRB	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	8 OPD	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Inspektorat								√	√	√	√
		Jumlah OPD yang melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		2 OPD	Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Inspektorat											
		indcks maturitas SPIP	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Indcks Maturitas SPIP 3	Penilaian Maturitas SPIP	Inspektorat											

OPD | KABAG HUKUM

		Level Kapabilitas APIP		Level 3	Peningkatan Kapabilitas APIP	Inspektorat												
2	Terlaksananya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP dan BPK	Persentase Temuan Selesai ditindak lanjuti	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	78%	1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Inspektorat									√	√	√	√
					2 Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan BPK													
3	Terlaksananya Evaluasi SAKIP OPD	Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai SAKIP minimal "B"		70%	Evaluasi SAKIP OPD dan Reviu Laporan Kinerja Pemda	Inspektorat									√	√	√	√
4	Terlaksananya penaganan kasus pengaduan masyarakat yang diterima	Persentase Pengaduan Masyarakat selesai		90%	Penanganan kasus pengaduan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	Inspektorat									√	√	√	√
5	Terlaksananya Audit berbasis Kinerja terhadap OPD tertentu	Jumlah Pelaksanaan Audit Kinerja terhadap OPD		10 OPD	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Inspektorat									√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

6	Tersusunnya PKPT berbasis Risiko	Jumlah PKPT Berbasis Risiko		4 PKPT Berbasis Risiko	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	Inspektorat									√	√	√	√
	Tersusunya Peta Auditan	Jumlah Peta Auditan		16 Peta Auditan											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

H	**PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**						
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	**Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**100%**	**Pembuatan dan Penerbitan Majalah Beguai Jejama**	Bagian Humas dan Protokol	√ √ √ √
					Penerbitan Buku Selayang Pandang	Bagian Humas dan Protokol	
					Peningkatan Kualitas Penyiaran Radio	Bagian Humas dan Protokol	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

	meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Bimtek Pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) dan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)	Bagian Organisasi	
	meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Fasilitasi Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Bagian Organisasi	√ √ √ √
	meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah		Fasilitasi Pencapaian SPM	Bagian Organisasi	

OPD | KABAG HUKUM

	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik berbasis IT.	indeks kepuasan pelayanan masyarakat.																			
			Persentase Pelayanan yang telah berbasis IT secara terintegrasi																			
	Kualitas tata kelola pemerintahan yang profesional dan amanah dengan berorientasi pada pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi belum optimal	Efektifitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase Layanan Sekretariat Daerah	Pengendalian Administrasi Pembangunan	Operasional dan Pengembangan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kepala Sub Bagian Bina Program										√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

			terpenuhi			dan LPSE	
					Operasional Sistem Aplikasi Pelaporan Secara Online Kabupaten Lampung Barat	Kepala Sub Bagian Pelaporan	
	meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Terbina dan Meningkatnya Pengetahuan Sumber Daya Aparatur	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		20%	Pembuatan SK Tim Admin Lokal, Pejabat Penghubung dan Administrator OPD	
						Pelaksanaan Pendampingan Teknis	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

						i	
						Pelaksanaan Survei Lanjutan	
	meningkatnya kualitas Layanan Pemkab. Lampung Barat	Meningkatnya Pemahaman Fungsi dan Peran Kelembagaan	Peningkatan Fungsi dan peran Kelembagaan Daerah		50%	Pembuatan SK Tim Koordinasi	
						Rapat Tim dalam rangka penyusunan SPM	
						Rapat reviu hasil penyusunan dokumen SPM	
						Cetak Hasil Doku	

OPD | KABAG HUKUM

						men														
	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Lampung Barat	**Persentase Publikasi kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa**	**Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa**	**Persentase Peningkatan Publikasi Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa**	**Persentase Peningkatan Publikasi Kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat di Media Massa - 100%**	Membuat SK Bupati tentang Redaksi Majalah Beguai Jejama TA 2018									√	√	√	√
						Mengumpulkan bahan dan pembuatan artikel														
						Cetak Majalah														

OPD | KABAG HUKUM

						Pendistribusian Majalah Beguai Jejama																	
						Membuat SK Penggunaan Anggaran tentang Redaksi Buku Selayang Pandang TA 2018																	
						Mengumpulkan bahan dan pembuatan artikel																	
						Cetak Buku Selayang																	

OPD | KABAG HUKUM

						Pandang															
						Pendistribusian Buku Selayang Pandang															
						Membuat SK Bupati tentang Pembina dan Pengelola Radio Swara Praja 98,6 FM TA 2018															

OPD | KABAG HUKUM

						Koordinasi dengan Balai Frequensi Radio, KOMINFO Provinsi Lampung dan KPID Lampung serta KEMENKOMINFO RI	
						Pelaksanaan siaran rutin	
						Membuat SK Penggunaan Anggaran tentang	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

						Membuat SK Penggu na Anggaran tenta ng Pengelola Pembuatan Poster dan Balih o Pembangunan TA 2018															
						Pelaksanaan Pemeliharaan dan pembuatan Billboard															

OPD | KABAG HUKUM

						Pencetakan Baliho, Spanduk dan Sticker serta pelaksanaan publikasi program pembangunan melalui sewa billboard																
						Pencetakan Baliho dan Spanduk untuk momen hari-hari besar																

OPD | KABAG HUKUM

						Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)																	
						Penyiapan bahan advetorial dan Penerbitan pada SKHU dan Media Digital																	
						Penyiapan bahan advetorial dan Penerbitan pada SKM																	

OPD | KABAG HUKUM

						Membuat SK Penggguna Anggaran tentang Pengelola Pembuatan Bingkai beserta Foto Pejabat Negara TA 2018																	
						Persiapan kelengkapan administrasi dan pemilihan penyedia																	
						Cetak Foto beserta Pembuatan																	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

						pelaksanaan kegiatan rekruitment																	
						laporan akhir kegiatan																	
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu	**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu**	**Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Tepat Waktu - 100%**	Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)												√	√	√	√
						Pencatatan, pendokumentasian dan pendistribusian SKHU,																	

OPD KABAG HUKUM

						SKM, Majalah	
						Membuat Surat Perjanjian Kerja (SPK)	
						Penyiapan bahan dan penerbitan publikasi pembangunan (IKLAN)	
						Penyiapan bahan-bahan pameran pembangunan	

OPD | KABAG HUKUM

						Pelaksanaan kegiatan pameran pembangunan																	
	Efektifitas pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Persentase Layanan Sekretariat Daerah terpenuhi	Pengendalian Administrasi Pembangunan		Persentase Pelaksanaan Pengendalian Administrasi Pembangunan di Kabupaten Lampung Barat	Membuat SK Tim LPSE										√	√	√	√
						Operasional Sistem SPSE																	
						Pemerlihaaan Sistem SPSE																	
						Membuat surat undangan rapat Tim																	
						Melaksanakan asistensi pengg																	

OPD | KABAG HUKUM

						Melakukan Sosialisasi dan Proses Entry Data SiAP Online																
						Melakukan Monitoring atas Entry bulanan Data SiAP Online																
	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintah	Meningkatnya Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Daerah	Peningkatan Fungsi dan Peran Kelembagaan Daerah		Meningkatnya Persentase Peningkatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Daerah	Membuat SK Tim Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Pelaksana										√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

						una SPSE	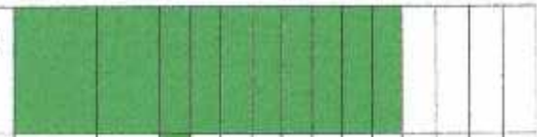
						Membuat surat permohonan narasumber	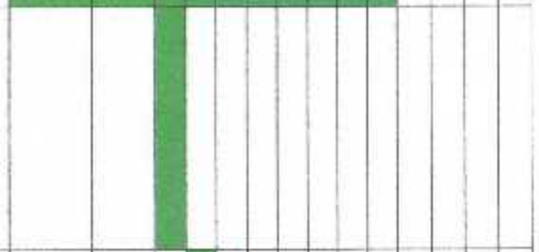
						Membuat surat undangan peserta sosialisasi	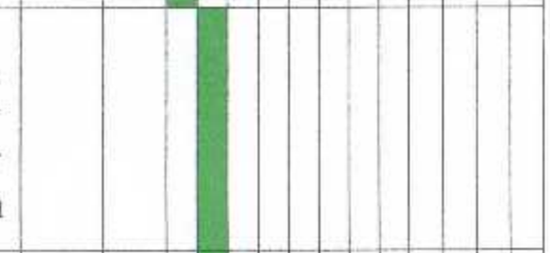
					100%	Melaksanakan kegiatan sosialisasi	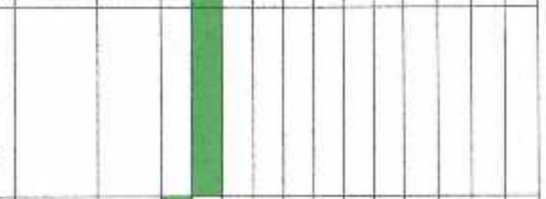
						Melaksanakan belanja modal	
						Membuat SK Tim	

OPD | KABAG HUKUM

						an Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan																	
						Membuat format pelaporan perizinan PATEN																	
						Membuat surat permintaan laporan perizinan PATEN ke 15 kecamatan di Kabupaten Lamp																	

OPD | KABAG HUKUM

						ung Barat																
						Mengumpulkan laporan perizinan PATEN dari 15 kecamatan di Kabupaten Lampung Barat																
						Rapat penyusunan laporan PATEN																
						Menyusun laporan PATEN																

OPD KABAG HUKUM

| | | |

						RAH																	
						KABID PBB																	
						KABID PENDAPATAN DAERAH																	
						KABID PENDAPATAN DAERAH																	
						KABID PENDAPATAN DAERAH																	
						KABID PENDAPATAN DAERAH																	

OPD | KABAG HUKUM

						KABID PENDAPATAN DAERAH																	
						KABID PENDAPATAN DAERAH																	
			Program Penyuluhan Terhadap Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta PBB	Persentase realisasi PBB		KABID PBB																	
			Program Melakukan Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Persentase realisasi PAD		KABID PENDAPATAN DAERAH																	

OPD | KABAG HUKUM

			serta PBB																			
						KABID PENDAPATAN DAERAH																
						KABID PBB																
1	Meningkatnya Profesionalisme Kinerja Aparatur	Persentase Peningkatan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja															√	√	√	√		
		Persentase Kinerja Aparatur Dalam Pelaksanaan Administrasi Perkantoran																				
			Program Pelayanan Administrasi Perkant																			

OPD KABAG HUKUM

			oran																				
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1000 surat													√	√	√	√
					750 surat																		
																		√	√	√	√
				Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik.	1 rekening													√	√	√	√
					1 rekening													√	√	√	√
					1 rekening													√	√	√	√
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	2 Unit													√	√	√	√
					5 Unit													√	√	√	√
					1 Unit													√	√	√	√
																		√	√	√	√
				Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	4 Buah													√	√	√	√
				Penyediaan Jasa	1 Orang													√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

				Kebersihan Kantor	14 Jenis														√	√	√	√
				Penyediaan Alat Tulis Kantor	32 Jenis														√	√	√	√
				Penyediaan Barang Cetak dan Pengganda an	8 Jenis														√	√	√	√
					2 Jenis														√	√	√	√
				Penyediaan Komponen Instalasi listrik penerangan Bangunan Kantor.	2 Jenis														√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

				Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundang-undangan	4 SKHU													√	√	√	√
				Penyediaan Makanan dan Minuman	24 Kali													√	√	√	√
					24 Kali													√	√	√	√
				Rapat-Rapat Koord.& Konsul. ke Luar Daerah	12 Bulan													√	√	√	√
				Penyediaan Jasa Propaganda / Publikasi/ Pameran	1 Kali													√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

				Rapat-Rapat Koord.& Pembinaan Dalam Daerah	12 Bulan														√	√	√	√
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur																			
				Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	2 Unit																		
				Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	1 Unit																		

SPD | KABAG HUKUM

| | | |

			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur																		
				Pendidikan dan pelatihan formal	4 Orang													√	√	√	√
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kerja dan Keuangan																		

OPD | KABAG HUKUM

				Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Dokumen											√	√	√	√
				Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1 Dokumen											√	√	√	√
				Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen											√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

2	Meningkatkan Keselarasan Perencanaan Pembangunan Daerah	Nilai SAKIP Kabupaten																					
		Persentase Tingkat Keselerasan RKPD terhadap RPJMD																					
		Persentase Tingkat Keselarasan Renstra OPD terhadap RPJMD																					
		Persentase Tingkat Keselarasan Renja OPD terhadap RKPD																					
			Program Perencanaan Pembangunan Daerah																				
				Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Layanan	15 Kecamatan												√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

				Aksi Kinerja Lampung Barat																			
				Pelaksanaan Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah	12 Bulan													√	√	√	√
				Pelatihan Penyusunan Renstra OPD	45 OPD													√	√	√	√
				Study Feasibility Pinjaman Daerah	1 Dokumen													√	√	√	√
				Penyusunan Analisis Standar Belanja Kabupaten Lampung Barat	1 Perbup													√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

			Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat			
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat	12 Bulan		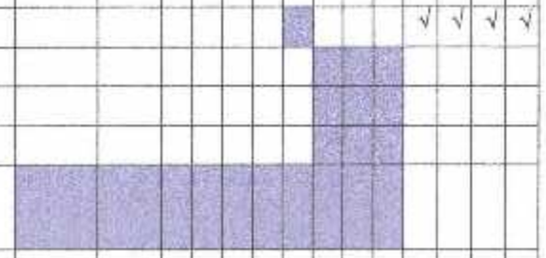
			Penyusunan Strategi Pembangunan Bidang Ketahanan Pangan	100 Eks		
			Fasilitasi Program Pengentasan Kemiskinan dan Ketertinggalan	87 Desa Berkembang		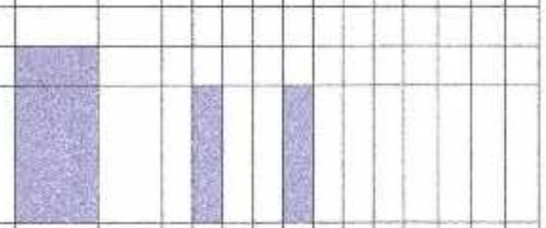
			Fasilitasi	15 Orang		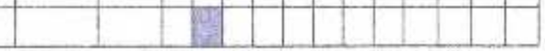

OPD KABAG HUKUM

				Klaster Kopi di Kawasan Agropolitan																			
				Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan SDG's Kabupaten Lampung Barat	50 Eks													√	√	√	√
				Study Kelayakan Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	1 Buku													√	√	√	√
			Program Perencanaan Tata Ruang																				
				Koordinasi	12 Bulan													√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

				Koordinasi Satuan Tugas Rencana Terpadu dan Program Infrastruktur Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya		
				Fasilitasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Sanitasi	15 Peratin	
				Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sumber Daya Alam	12 Bulan	√ √ √ √
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Rata-rata Capaian Indikator Sasaran RPJMD				√ √ √ √

OPD KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

				Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (Aksi PPK Pemda)																		
				Evaluasi RPJMD Kabupaten Lampung Barat	35 Buku																	
				Penyusunan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (e-LKPj)	1 Aplikasi 30 Orang																	
4.	Tersedianya Data dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Berkualitas	Persentase Keterisian Data pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)																				
		Persentase Data Pembangunan Yang Terintegrasi																				

OPD KABAG HUKUM

| | | |

				Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)																
				Koordinasi Pengembangan Data Spasial	25%												√	√	√	√
					3o Orang												√	√	√	√
1.	Meningkatnya deteksi dini terjadinya konflik sosial	Persentase gejala konflik yang dapat diatasi	**PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**Persentase pembinaan wawasan kebangsaan dan ideologi negara di Kabupaten Lampung Barat**	**135,669,500**												√	√	√	√
		Persentase cakupan wilayah rawan konflik																		
				Sosialisasi Wawasan Kebangsaan	Jumlah peserta sosialisasi	72,511,000												√	√	√	√

			Sosialisasi Bahaya Radikalisme, Terorisme dan Premanisme	Jumlah peserta sosialisasi	49,150,000																	
			Dialog Interaktif Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah peserta dialog interaktif	-																	
			Rapat Koordinasi Tim Pemantau Kunjungan Tamu Luar Daerah /Orang	Jumlah laporan	14,008,500																	

OPD | KABAG HUKUM

			Asing (WNA)																		
			PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	**Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kab. Lampung Barat.**	**421,604,000**												√	√	√	√
			Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	Jumlah pembinaan FPK	-																

OPD KABAG HUKUM

| | | |

			Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	Jumlah peserta	52,948,000																
2.	Meningkatnya penanganan penyelesaian kasus konflik SARA	Jumlah konflik SARA yang diselesaikan	**PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN**	**Persentase pertumbuhan dan perkembangan Ormas/LSM di Kab. Lampung Barat.**	**133,726,500**												√	√	√	√
			Penyediaan Jasa Pendukung Komunitas Intelijen Daerah	Jumlah laporan	113,728,000												-	-	-	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

			MBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	**Ormas/LSM di Kab. Lampung Barat.**																		
			Forum Silaturahmi dan Pembinaan Ormas/ LSM Kabupaten Lampung Barat	Jumlah peserta forum silaturahmi	130,593,000																		
			Penyusunan Data Base Kesbang dan Politik	Jumlah dokumen data base Kesbangpol	18,388,000																		

OPD KABA... HUKU...

4.	Menurunnya kasus konflik terkait politik	Persentase kasus terkait politik yang diselesaikan	**PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT**	**Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu**	**538,229,000**															
			Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah peserta diskusi politik	74,074,000															

OPD | KABAG HUKUM

			Penyediaan Jasa Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah berkas partai politik penerima bantuan keuangan yang di verifikasi	41,419,000		
			Sosialisasi Undang - Undang Bidang Politik	Jumlah peserta sosialisasi	122,808,000		

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

| | | |

						ja	
					100%	Membuat Laporan	
						Menyusun Rencana Laporan Semesteran	
						Melaksanakan Koordnasi	
						Pelaksanaan Penyusunan	
						Membuat Laporan	
						Menyusun Rencana Laporan Progn	

OPD | KABAG HUKUM

						osis Realisasi Anggaran																	
						Melaksanakan Koordnias i																	
						Pelaksanaan Penyusunan																	
						Membuat Laporan																	
						Menyusun Rencana Laporan Akhir Tahun																	
						Melaksanakan																	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

						buat Laporan	
						Menyusun Rencana Pengelolaan Keuangan Daerah	
						Melaksanakan Koordinasi	
						Pelaksanaan Kegiatan	
						Membuat Laporan	
						Menyusun Rancangan Renstra	
						Melaksanakan	

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan belum optimal dalam upaya untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan Publik berbasis IT.	Persentase Pelayanan yang telah berbasis IT secara terintegrasi		Jumlah sistem pelayanan Disbunnak yang ditingkatkan															

OPD | KABAG HUKUM

		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Persentase media informasi pembangunan yang mendapat respon masyarakat		Jumlah peserta sosialisasi															

OPD | KABAG HUKUM

			Persentase informasi pembangunan yang dipublish kepada masyarakat secara up to date		Jumlah informasi pembangunan yang up to date															
	tersedianya sarana dan prasarana pengolahan persampahan	pelayanan pengelolaan persampahan	penyediaan prasarana dan sarana pengolahan persampahan		terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang baik	menyusun data jumlah kendaraan pengangkut sampah										√	√	√	√
						Melaksanakan Koordinasi														

OPD BAGIAN HUKUM

| | | |

						da pihak yang bersangkutan															
						Membuat laporan kepada dapimpinan sesuai dewngan arahan pimpinan															
	Tercapainya Pemasangan dan Pemeliharaan penerangan jalan umum di beberapa wilayah	Persentase Ketersediaan Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan umum	Pemasangan dan Pemeliharaan Sarana Penerangan Umum		Terwujudnya Pemasangan dan Pemeliharaan Penerangan umum	Membuat data titik lampu yang belum di pasang															
						Melakukan koordinaasi															

OPD KAB HUKUM

						Pelaksanaan Kegiatan																			
						Membuat laporan lampu yang sudah terpasang																			
						Mebuat data titik lampu yang belum di pelihara																			
						Melakukan koordinaasi																			
						Pelaksanaan Kegiatan																			

OPD KABAG HUKUM

						Membuat laporan lampu yang sudah terpelihara															
	Tersedianya SDM yang berkompeten di Bidang Lingkungan Hidup	Perlunya penambahan penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD)	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Mencari Bimtek tentang Lingkungan Hidup										√	√	√	√
						Melakukan koordinaasi															
						Pelaksanaan Kegiatan															
						Membuat laporan															

OPD KABAG HUKUM

	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Meningkatnya Layanan Informasi Kepada Masyarakat	Program Pengembangan Komunikasi,Informasi dan Media Massa	Pelayanan dan Perluasan Akses Komunikasi dan Informasi													√	√	√	√
				Jumlah Peserta	40 Orang															
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah Alat Studio	8 Unit												√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

| | | |

	Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah Tower	80 Tower													√	√	√	√		
	Birokrasi yang bersih dan akuntabel			Jumlah informasi yang dapat dipertangg ungjawabk an serta sistem penyediaan layanan informasi secara cepat mudah dan wajar	12 bulan/1 Tahun													√	√	√	√		

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

	Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-goverment	% OPD yang melaksanakan E-Governmend	Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi	Penerapan dan Pengkajian Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)											√	√	√	√
				Jumlah Tim Bankom	4 Orang	Monitoring kondisi wilayah													
						Pelaksanaan Bankom dilokasi bencana													
						Laporan pelaksanaan kegiatan													
	Terwujudnya OPD yang Melaksanakan E-goverment			Jumlah Pengembangan Android	1 Unit	Koordinasi dan Konsultasi ke Kemenkominfo										√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

						aplikasi																
						Menyiapkan dokumen lelang untuk BM Pengadaan Software Aplikasi Smart City																
						Koordinasi dengan KLP kaitan tahapan lelang BM Pengadaa																

OPD | KABAG HUKUM

						n Softw are Aplik asi Smar t City																	
						Mem persi apka n Loun ching Smar t City																	
						Meny eleksi dan melat ih opera tor komp uter dan tenag a tekni si jaring an terkai t aplik asi Smar t City																	

OPD

| | | |

						accu, TV dan Peralatan Jaringan																
	Tersedianya Data Informasi Publik yang akurat, Aman dan Indeks Kepercayaan Masyarakat (IKM)	% data informasi publik yang akurat, aman dan indeks kepercayaan masyarakat (IKM)	Program Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi	Pengamanan Jaringan Komunikasi dan Informasi Sandi													√	√	√	√
				Tersediany a Tower Untuk Antena Radio Komunikas i	4 Unit	Meny usun Harg a Perki raan Sendi ri															
						Prose s Peng adaa n															
						Serah Terim a Bara ng															
						Pemb ayara n															

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

					Belanja Operasional SKB Lampung Barat	**SUTIAN, S.Pd., M.Pd** (Kabid Pembinaan Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal)													

OPD | KABAG HUKUM

	Kurangnyan Kesadaran masyarakat akan pentingnya makanan sehat tanpa pengawet	Meningkatnya jumlah produk hasil perikanan yang sehat	Jumlah produk olahan ikan	Program Pengendalian dan Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan		Bidang Pengendalian dan Pemasaran	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SPT, Membuat laporan	[redacted]	√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

	Belum sesuainya Produksi Perikanan dengan Penebaran Benih Ikan Pada Masyarakat / Kelompok Pembudidaya Ikan	Meningkatnya Jaminan Kesehatan Ikan	Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SPT, Membuat laporan						√	√	√	√

	Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kelestarian lingkungan		Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengendalian dan Pemasaran	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SPT, Membuat laporan								√	√	√	√

OPD KABAG HUKUM

	banyak embung/cek dam yang tidak terawat sehingga mengurangi fungsi embung/cek dam tersebut		Jumlah produksi perikanan budidaya dan tangkap	Pengembangan Perikanan Budidaya dan Tangkap			Bidang Pengendalian dan Pemasaran	Menyusun Jadwal Kegiatan, Membuat SPT, Membuat laporan									√	√	√	√

	Pandangan sebagian masyarakat yang menganggap masih rendahnya kinerja DPRD	Meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap kinerja DPRD	Persentase pemahaman masyarakat terhadap Kinerja DPRD	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jasa Penyiaran Televisi Daerah	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI										√	√	√	√
						KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI															
						KABAG UMUM DAN KEHUMASAN															
						KASUBBAG HUMAS DAN DOKUME															

						NTAS I	
					Penerbitan Berita Melalui Jaringan Internet dan Website	KASU BBA G HUM AS DAN DOK UME NTAS I	
						KABA G UMU M DAN KEH UMA SAN	
						KASU BBA G HUM AS DAN DOK UME NTAS I	
					Pembuatan dan Penerbitan Majalah	KASU BBA G HUM AS DAN DOK	

OPD KABAG HUKUM

						UMENTASI																				
						KABAG UMUM DAN KEHUMASAN																				
						KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI																				
					Jasa Penyiaran Televisi Daerah dan Streaming Media Online	KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-									
						KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI																				

OPD KABAG HUKUM

						1																	
						KABAG UMUM DAN KEHUMASAN																	
						KASUBBAG HUMAS DAN DOKUMENTASI																	
	Belum adanya panti Sosial guna Menampung para PMKS	Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Pemberdayaan Fakir Miskin,KAT dan PMKS lainnya	Pembuatan SK Kegiatan,mengeluarkan surat pemberitahuan tentang kegiatan TKSK,Menyeleksi proposal												√	√	√	√			
					mengeluarkan surat pemberitahuan tentang kegiatan TKSK,Menyeleksi proposal																		
					Menyeleksi proposal																		

OPD KABAG HUKUM

			PMKS Lansia (Lanjut Usia Terlantar)		Membuat SK Kepala Dinas,menyiapkan surat undangan,mengadakan rapat persiapan,membagikan blangko kepada TKSK,Monitoring terhadap TKSK,Entry Data dan cetakan Buku														
					menyiapkan surat undangan														
					mengadakan rapat persiapan														
					membagikan blangko kepada TKSK														
					Monitoring terhadap TKSK														
					Entry Data dan cetakan Buku														
					Cetak Buku hasil Pemerikasaan TKSK dan PMKS														
			PMKS Cacat (Penyandang Disabilitas)		Mempersiapkan SK Tim Koordinasi PKH,Mempersiapkan Pelaksanaan Sosialisasi,mempersiapkan Pelaksanaan PKH,mempersiapkan Rapat Pendamping Operator PKH,Mempersiapkan Parat Tim Koordinasi mengklasifikasi														

OPD | KABAG HUKUM

					untuk narasumber PKH															
					Mempersiapkan Pelaksanaan Sosialisasi															
					mempersiapkan Pelaksanaan PKH															
					mempersiapkan Rapat Pendamping Operator PKH															
					Mempersiapkan Rapat Tim Koordinasi mengklasifikasi untuk narasumber PKH															
	Masih Banyaknya Jumlah Keluarga Miskin	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial	Persentase Penyandang Cacat yang Mandiri	Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Eks trauma	Menyiapkan dan menyampaikan surat ke Kecamatan untuk mendapatkan KUBE,mengoreksi Proposal KUBE,memfasiitasi Penyerahan bantuan bagi KUBE PACA											√	√	√	√
					mengoreksi Proposal KUBE															

OPD | KABAG HUKUM

					memfasiitasi Penyerahan bantuan bagi KUBE PACA															
					Melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat															
				Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Mempersiapkan Peserta Pelatihan TAGANA di 15 Kecamatan,mempersiapkan narasumber,Instruktur Pelatihan TAGANA,Mempersiapkan sarana dan prasarana Pelatihan															
					Mempersiapkan Peserta Pelatihan TAGANA di 15 Kecamatan,															
					Mempersiapkan Narasumber,Instrukktur Pelatihan TAGANA															
					Mempersiapkan Sarana dan Prasarana Pelatihan															
					Mempersiapkan Pelaksanaan Penilaian Organisasi dan Kepemudaan															
					Melaksanakan dan memfasilitasi bagi Penyandang Cacat															

OPD | KABAG HUKUM

| | | |

| | | |

	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan informasi pembangunan	Persentase media informasi pembangunan yang mendapat respon masyarakat																√	√	√	√
		Persentase informasi pembangunan yang dipublish kepada masyarakat secara up to date																			
	Meningkatnya upaya pelayanan kesehatan masyarakat (Jamkesmas/JKN)	Persentase Pasien kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI rawat inap yang dilayani	Penyediaan makanan pendamping pasien kurang mampu JAMKESMAS/JKN PBI	Menyediakan makan minum pendamping pasien Jamkesmas/JKN PBI (70 org x 12 bln x 3 kl x 5 hr)	23,775,000													√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

			Biaya perawatan dan pengobatan pasien tanggungan negara	Biaya pengubura n pasien tanggungan negara, pengobatan pasien akibat tindakan petugas negara, perawatan pasien terlantar, perawatan pasien KLB dan perawatan pasien gizi buruk (7 Orang)	-		-	-													

OPD | KABAG HUKUM

	meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik berbasis IT	Indeks kepuasan masyarakat	Pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi RS berbasis IT	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat												√	√	√	√

OPD | KABAG HUKUM

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap tiga bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan enam bulan sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam tigabulan sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam tiga bulan.
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-

OPD | KABAG HUKUM

masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak satu bulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan

OPD | KABAG HUKUM

yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan enam bulan sekali;
3. Pengelolaan pengaduan.
4. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
5. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam satu tahun sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

OPD | KABAG HUKUM

Pada lingkup pemerintah kabupaten, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;

OPD | KABAG HUKUM

BAB V
PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lampung Barat 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kabupaten Lampung Barat dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran, pengorbanan dan memakan banyak waktu, namun harus dilakukan dan tidak boleh ditunda. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus terus dibangun agar dapat dibangun tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	Bag. Organisasi	
5	Bappeda	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
	BAGIAN HUKUM	